

ABSTRAK

Okri Shan Tria Purba (00000023463)

KERJA SAMA ASEAN DAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (2014 - 2018)

(XIV + 60 Halaman: 2 Table; 3 Lampiran)

Perdagangan manusia merupakan isu kejahatan lintas negara yang perlu ditanggulangi secara bersama-sama oleh Indonesia dan ASEAN khususnya di lingkup regional Asia Tenggara melalui upaya kerja sama. Hal tersebut dinilai sebagai aksi jawaban pemerintah Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya untuk berkomitmen menjalankan kerja sama tersebut melalui berbagai cara di level ASEAN seperti pengesahan ASEAN *Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children* ataupun melalui ASEAN *Convention Against Trafficking in Person (ACTIP)*. Program kerja sama tersebut telah dimulai sejak tahun 2004 melalui konvensi KTT ASEAN di Laos. Diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut bisa meminimalisasi maraknya perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak di kawasan Asia Tenggara tepatnya di Indonesia, dimana Indonesia kerap dijadikan tempat jalur peredaran oleh pelaku kejahatan transnasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori neoliberal, regionalisme, transnational organized crime (TOC), dan human trafficking. Dalam upayanya mengatasi kasus perdagangan perempuan dan anak, Indonesia dan ASEAN telah menempuh banyak cara terutama di masa kepemimpinan presiden Joko Widodo periode pertama. Pada tahun 2014 hingga 2018 kerja sama tersebut melalui berbagai forum seperti adanya penandatanganan Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP-WC) di Kuala Lumpur Malaysia tahun 2015. Selain itu penanggulangan perdagangan perempuan dan anak dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga dimaksimalkan ke tingkat nasional dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Gugus Tugas PP-TPPO), melalui sosialisasi pencegahan TPPO oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dengan membuat program layanan pendidikan terkait pencegahan di 10 Provinsi. Terakhir skripsi ini membahas upaya Pemerintah Indonesia dalam membangun database Sistem Informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak di tahun 2018.

Kata Kunci: Transnational Crime, Perdagangan Manusia, Upaya Indonesia & ASEAN
Refrensi: 18 Buku + 23 Jurnal + 6 Laporan + 2 Undang-Undang + 3 media daring

ABSTRACT

Okri Shan Tria Purba (00000023463)

ASEAN AND INDONESIA COOPERATION IN TACKLING THE TRAFFICKING OF WOMEN AND CHILDREN (2014 - 2018)

(XIV + 60 Pages: 2 Table; 3 Report)

Human trafficking is a trans-border crime issue that needs to be addressed jointly by Indonesia and ASEAN especially in the southeast Asia region through cooperation efforts. This is considered as an action by the Government of Indonesia and other ASEAN member countries to commit to carry out the cooperation through various means at the ASEAN level such as the ratification of the ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children or through the ASEAN Convention Against Trafficking in Person (ACTIP). The cooperation program has been started since 2004 through the ASEAN Summit conference in Laos. It is expected that the cooperation can minimize the rise of human trafficking especially women and children in Southeast Asia precisely in Indonesia, where Indonesia is often used as a place of circulation by transnational criminals. This research uses qualitative approach and descriptive method. The theories used in this study are neoliberal theory, regionalism, transnational organized crime (TOC), and human trafficking. In its efforts to address the trafficking of women and children, Indonesia and ASEAN have gone many ways, especially during president Joko Widodo's first term. In 2014 to 2018 the cooperation was through various forums such as the signing of the ASEAN Convention Against Human Trafficking, Especially Women and Children (ACTIP-WC) in Kuala Lumpur Malaysia in 2015. In addition, the prevention of women and children's trade by the Indonesian government is also maximized to the national level by establishing a Task Force on Prevention and Handling of People's Crimes (PP-TPPO Task Force), through the socialization of TPPO prevention by the Ministry of Education and Culture of Indonesia by creating educational services programs related to prevention in 10 provinces. Lastly, this thesis discusses the efforts of the Government of Indonesia in building an Online Information System for the Protection of Women and Children in 2018

Key Words: Transnational Crime, Perdagangan Manusia, Upaya Indonesia & ASEAN
Referensi: 18 Book + 23 Journal + 6 Report + 2 Undang - Undang + 3 Website